

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon Philipus M. dkk, 2010, *Hukum Administrasi dan Good. Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang-education, Yogyakarta.
- Fuhmal, A Muin, 2006, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng , 2007, *Penulisan Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Karianga, Hendra, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Prespektif Hukum dan Demokrasi*, Alumni, Bandung.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* , UNY Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo , Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Na'a, Suprin, 2010, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Solekhan, Moch , 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.

Bahan Perkuliahan

- Sukisno, Djoko, Perkuliahan Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum tanggal 14 September 2015.

Internet

- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2015, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeude_sa.pdf diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 10.30 WIB.

- DJPk Departemen Keuangan, “Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2017” , <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf> diakses 30 Maret 2017 pukul 13.30 WIB.
- Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen), Perspektif Volume XVII No. 1 tahun 2012 edisi Januari , hlm 59 <http://oaji.net/articles/2017/4674-1496730714.pdf> diakses 25 Juni 2018 pukul 20.15 WIB.
- Fana Suparman, BeriStasatu, “KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa”, <http://www.beritasatu.com/hukum/411628-kpk-telaah-laporan-dugaan-korupsi-dana-desa.html> diakses 30 Maret 2017 pukul 10.45 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Rincian APBNP2015 Dana Desa”, www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/18-Upload-Rincian-APBNP2015_DanaDesa.xlsx diakses 30 Maret 2017 pukul 11.00 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN 2016” , <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016> diakses 30 Maret 2017 pukul 13.30 WIB
- KPPOD, “Daerah Indonesia 2013”, <https://www.kppod.org/datapdf/daerah/daerah-indonesia-2013.pdf> diakses tanggal 30 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Cilacap, “Kondisi Umum” , <http://www.cilapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=3> diakses tanggal 30 Maret 2017 pukul 10.50 WIB.
- Pratiwi Cekli Setya dkk , “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Hukum Administrasi Negara”, (<http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>) diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.
- Putra, I Gede Eka, *AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat* (online), http://ptun-palembang.go.id/upload_data/AAUPB.pdf hlm 7, diakses tanggal 24 Maret 2017 pukul 09.30 WIB.
- Republika Online, “Korupsi Dana Desa, Kades Undur divonis 2,4 tahun” , <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/16/oi9yyq361-korupsi-dana-desa-kades-undur-divonis-24-tahun>, diakses tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.30 WIB.
- Ridwan “Jurnal Hukum No 27 Vol 11 September 2004” <https://media.neliti.com/media/publications/84297-ID-arti-penting-asas->

keterbukaan-dalam-peny.pdf 6, diakses tanggal 25 Juni 2018 pukul 20.00 WIB.

Seftian Lukow , *Eksistensi Good Governanc dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado, Vol.I/No.5/Okttober-Desember/2013* hlm 138 (online), http://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_DAERAH_DI_KOTA_MANADO.pdf diakses tanggal 30 Maret 2017 pukul 12.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2015 Nomor 44).